



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 31 Mei 2021

Halaman: 1

Komisi A DPRD Kota Jogja Dorong Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Hindari Kasus Hukum, Lakukan Sinkronisasi Aset Pemkot

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun membuat sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kontraksi. Beberapa target yang dicanangkan mengalami penyesuaian. Mau tak mau dalam situasi krisis ini diperlukan kreativitas.

"SALAH satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aset-aset Pemkot Jogja," ungkap Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra dalam perbincangannya dengan Radar Jogja kemarin (30/5). Optimalisasi aset itu di-

lakukan dengan cara mengadakan sinkronisasi. Langkah ini sekaligus belajar dari kejadian di Pemprov Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta. Akibat tidak sinkronnya aset daerah berdampak terjadinya kasus hukum ■

► Baca *Hindari...* Hal 11



FOTO FOTO: ISTIMEWA

TURBA SERAP ASPIRASI: Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra (kiri) berdialog dengan elemen masyarakat duduk santai di tepi jalan. Foto kanan Candra sebagai bagian dari penyelenggara negara mendukung setiap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

melak Lanjut

Hindari Kasus Hukum, Lakukan Sinkronisasi Aset Pemkot

Sambungan dari hal 1

Mengantisipasi itu, Candra ingin Pemkot Jogja secepatnya mengadakan pendataan aset secara komprehensif. Khususnya terhadap aset-aset yang dikuasai dan dimiliki Pemkot.

Kader Partai NasDem ini membeberkan aset-aset Pemkot Jogja terbagi atas dua hal. Pertama, aset yang berasal dari belanja modal. Kedua, aset dari Pemprov DIY maupun tanah kasultanan yang pengelolaannya dikuasakan ke Pemkot Jogja dalam waktu tertentu.

Lebih jauh dikatakan, pendataan aset secara terpadu dan sistematis dapat membantu Pemkot Jogja memanfaatkan aset daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Dengan begitu, lanjut Candra, peningkatan PAD tidak hanya dititikberatkan pada kenaikan pajak-pajak daerah terhadap

masyarakat. Namun dengan manajemen pengelolaan aset daerah yang lebih optimal. "Sebagai fungsi pendukung APBD," ujar suami Wiewie Candra ini.

Candra menambahkan Komisi A yang dipimpinnya tengah mengadakan kajian menyangkut pengelolaan aset daerah agar lebih optimal. Kajian itu masih bersifat terbatas pada aset *tan-gibel* dan *intangible*. Meski demikian, dia bertekad bakal memperdalam. Yakni pada aset-aset bergerak dan tidak bergerak.

Di bagian lain dia juga mendukung langkah Pemkot Jogja yang hendak menginventarisasi aset melalui pendirian Bank Tanah. Tujuannya untuk memastikan aspek hukum status kepemilikan aset daerah. Sekaligus memastikan jumlah sebaran aset.

Realisasi pembentukan Bank Tanah dilakukan dengan kerja sama Pemkot Jogja dan Kantor

Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jogja. Candra menilai ada dua keuntungan dari rencana pendirian Bank Tanah itu.

Pertama, Bank Tanah akan melindungi seluruh aset milik Pemkot. Kedua, Bank Tanah dapat mengurangi konflik hak kepemilikan antara Pemkot dengan pihak tertentu. "Termasuk dengan masyarakat di lapangan," lanjut ayah dua anak ini.

Pria yang tinggal di daerah Sayidan, Gondomanan, Jogja itu juga menyarankan agar Pemkot mengidentifikasi jumlah aset yang dimiliki sebelum didaftarkan ke Bank Tanah. Identifikasi berguna untuk pengelolaan aset.

"Identifikasi harus berdasarkan alas hukum yang kuat," ujar lulusan Jurusan Agronomia Akademi Pertanian Yogyakarta (APTA) dan Agrobisnis Universitas Janabadra ini. (**/kus/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005